



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**BAPPEDA KOTA JAMBI 2023**

BADAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN  
KOTA JAMBI  
BADAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN  
(BAPPEDA)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk komitmen nyata Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan/kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu, LKjIP yang telah disusun ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan yang disebutkan diatas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan laporan di tahun yang akan datang.

Jambi, Januari 2024

Kepala BAPPEDA Kota Jambi,



**SUHENDRI, SH., M.Si**

Pembina Utama Muda,

NIP. 19700404 199601 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Jambi .....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.4 Isu-isu Strategis .....	5
1.5 Sumber Daya Aparatur .....	7
1.6 Sarana dan Prasarana.....	8
1.7 Keuangan .....	11
1.8 Sistematisa Penulisan .....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	13
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	14
2.1.1 Tujuan BAPPEDA Kota Jambi.....	15
2.1.2 Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi .....	15
2.1.3 Struktur Program Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi .....	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	21
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023.....	25
2.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	29
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	30
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	32
3.3.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.....	34
3.3.2 Membandingkan Realisasi Kinerja BAPPEDA Kota Jambi	
Tahun 2023 dengan Standar Nasional .....	43
3.3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	43
3.3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	
atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	46
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	54
3.4.1 Realisasi Anggaran.....	54
BAB IV PENUTUP .....	59
LAMPIRAN .....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Jambi pada Tahun 2023 Menurut Golongan Kepagkatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Bappeda Kota Jambi.....	9
Tabel 2.1	Cascading Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi 2018-2023 ke Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kota Jambi 2018-2023 .....	16
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Kota Jambi 2018-2023 .....	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2019-2023 .....	18
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran BAPPEDA Kota Jambi .....	19
Tabel 2.5	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran BAPPEDA Kota Jambi .....	20
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 .....	22
Tabel 2.7	Target Indikator Program BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023.....	23
Tabel 2.8	Target Indikator Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 .....	24
Tabel 2.9	Target Belanja BAPPEDA Kota Jambi APBD Perubahan 2023 .....	26
Tabel 2.10	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi pada APBD Perubahan Tahun 2023.....	27
Tabel 2.11	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Jambi 2023 .....	27
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	30
Tabel 3.2	Kategori Nilai Capaian Kinerja .....	30
Tabel 3.3	Capaian Realisasi IKU BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023.....	31
Tabel 3.4	Capaian IKU Bappeda Tahun 2019 s.d 2023.....	33
Tabel 3.5	Peringkat Nilai Capaian Indikator Kinerja .....	34
Tabel 3.6	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 oleh Kementerian PAN-RB.....	35
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Sasaran Strategis 1 .....	37
Tabel 3.8	Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Sasaran Strategis 2 .....	40
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Sasaran Stategis 3 .....	42

Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Anggaran dengan Hasil (Kinerja) .....	45
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 .....	47
Tabel 3.12 Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Tahun 2023 .....	54
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BAPPEDA Kota Jambi sampai dengan 31 Desember 2023 dan tahun 2022 .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi .....	62
Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi .....	63
Lampiran 3 : Inovasi BAPPEDA Kota Jambi .....	64
Lampiran 4 : Penghargaan / Prestasi BAPPEDA Kota Jambi .....	65
Lampiran 5 : Hasil Rekomendasi Kajian Tahun 2023 .....	66
Lampiran 6 : Pohon Kinerja BAPPEDA Kota Jambi.....	72
Lampiran 7 : <i>Cascading</i> Kinerja BAPPEDA Kota Jambi.....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

*Bab ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.*

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan landasan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diakhir masa RPJMMD periode tahun 2018 – 2023 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari BAPPEDA Kota Jambi berdasarkan dengan Rencana Strategis perubahan tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja tahun 2023 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 yang diharapkan dapat:

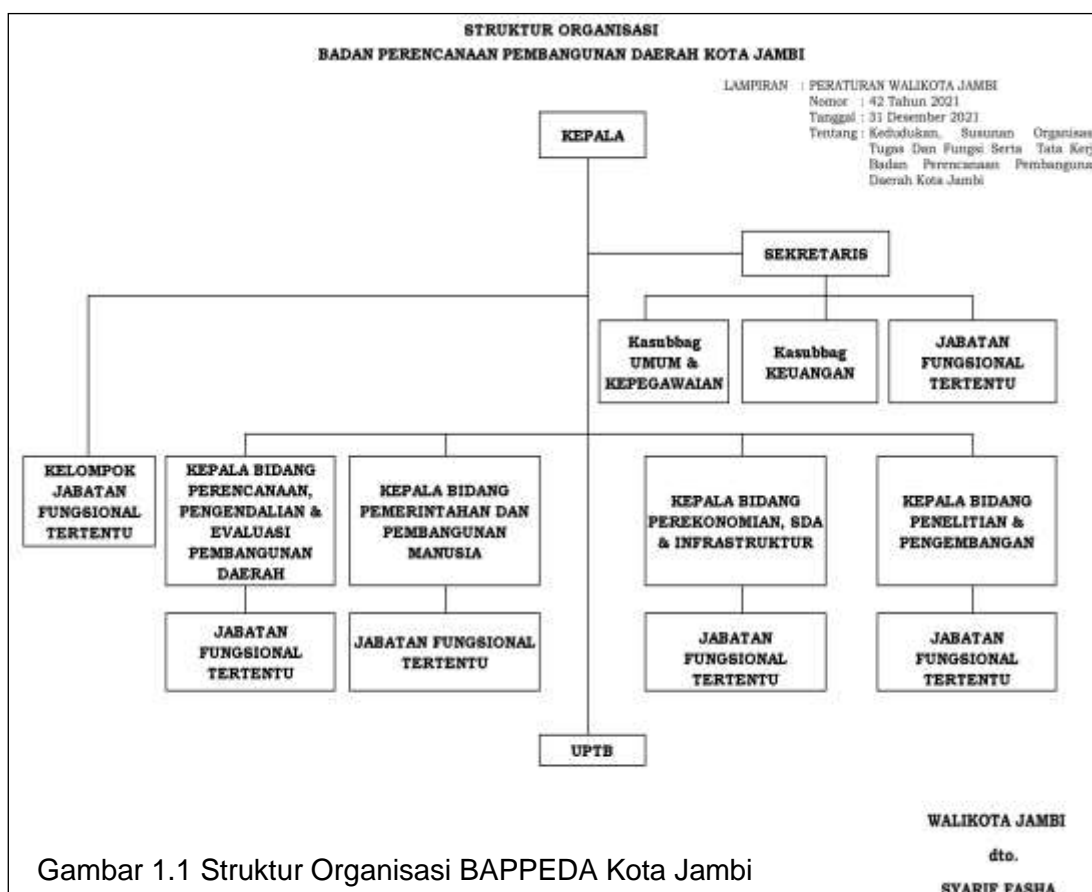
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BAPPEDA Kota Jambi;
2. Mendorong BAPPEDA Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan

perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BAPPEDA Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BAPPEDA Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, BAPPEDA merupakan lembaga teknis daerah yang membantu kepala daerah dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah Kota Jambi. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Jambi



### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dipimpin seorang Kepala Badan yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;
- 4) tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 5) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 6) pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang (Kabid), yaitu Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur, Kabid Penelitian dan Pengembangan, dan Kelompok Fungsional Tertentu.

Sekretariat BAPPEDA dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi pelayanan administrasi dibidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, administrasi, perlengkapan/aset dan kebutuhan rumah tangga serta

ketatausahaan dilingkungan BAPPEDA. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Kepala Sub Bagian Keuangan, serta seorang Pejabat Fungsional Arsiparis.

Untuk menjalankan fungsi BAPPEDA untuk urusan Penunjang Perencanaan, dilakukan oleh 4 bidang, yaitu :

Pertama, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang PPEPD mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kedua, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang PPM mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pendukung, penunjang bidang perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pemerintahan umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kewilayahan.

Kemudian yang ketiga adalah Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam (SDA) dan Infrastruktur (PSI), yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang PSI mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penunjang bidang keuangan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan kebakaran), pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik,

persandian, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral.

Sedangkan untuk menjalankan fungsi BAPPEDA pada urusan Penelitian dan Pengembangan, dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris. Bidang Litbang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan urusan penelitian dan pengembangan.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing. Pada tahun 2023, BAPPEDA Kota Jambi telah memiliki 10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Arsiparis Ahli Muda.

Selanjutnya untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang, pada badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Ketentuan mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTB ditetapkan dengan peraturan Walikota. Namun sampai akhir 2023, BAPPEDA Kota Jambi belum memiliki UPTB.

#### **1.4 Isu-Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis merupakan suatu

pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
3. Peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan sesuai rencana dan berhasil guna kesejahteraan masyarakat.
4. Optimalisasi sistem yang berbasis teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
5. Peningkatan peran Bappeda sebagai katalisator pembangunan daerah;
6. Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja.

Adapun yang dihadapi BAPPEDA Kota Jambi antara lain:

1. Belum optimalnya capaian kinerja sasaran daerah;
2. Belum optimalnya capaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk komponen perencanaan dan komponen pengukuran kinerja;
3. Implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal;
4. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah;
5. Minimnya ketersediaan data yang terverifikasi dan terdokumentasi dengan baik; dan

6. Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh BAPPEDA, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan.

Berdasarkan proses analisis faktor-faktor internal dan eksternal, mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan BAPPEDA Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Kajian kelitbangan yang komprehensif untuk perumusan kebijakan pembangunan.
4. Menumbuhkembangkan inovasi untuk mendukung daya saing daerah.

## **1.5 Sumber Daya Aparatur**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Kota Jambi memiliki sumber daya aparatur di tahun 2023 berjumlah sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 27 (dua puluh tujuh) orang Non PNS (Tenaga Kerja Kontrak/TKK).

Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar adalah pegawai laki-laki yaitu sebanyak 58,73% (37 orang) dan sisanya sebanyak 41,27% merupakan pegawai perempuan (26 orang). Kemudian berdasarkan Tingkat Pendidikan ASN terdapat 41,67% yang berpendidikan S2, dan

berpendidikan S1 hanya 44,44%. Sedangkan 13,89% nya adalah yang berpendidikan SMA/ sederajat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Jambi pada Tahun 2023  
Menurut Golongan/Kepangkatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Sub Unit Kerja	Jabatan	Jml	Golongan/Kepangkatan							Kualifikasi Pendidikan			Jenis Kelamin				
				II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	S2	S1	SMA	Lk	Pr	
1	Kepala	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1									1			1			
2	Sekretariat	1. Administrator	1							1		1			1			
		2. Pengawas	2			1		1					2		1	1		
		3. JFT, Perencana Ahli Muda																
		4. JFT, Arsiparis Ahli Muda	1					1					1			1		
		5. Pelaksana/Fungsional Umum	9	1	1	1	3	1	2				5	4	4	5		
		6. PPPK																
		7. Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak	10										1	4	5	7	3	
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>									<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>10</b>			
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Administrator	1						1			1			1			
		2. Pengawas																
		3. JFT, Perencana Ahli Muda	2						2				2			1	1	
		4. JFT, Arsiparis Ahli Muda																
		5. Pelaksana/Fungsional Umum	2			1	1						1	1		2		
		6. PPPK																
		7. Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak	5										1	4		3	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>									<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>			
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Administrator	1						1			1			1			
		2. Pengawas																
		3. JFT, Perencana Ahli Muda	3						3				1	2		1	2	
		4. JFT, Arsiparis Ahli Muda																
		5. Pelaksana/Fungsional Umum	2			1		1					2			2		
		6. PPPK																
		7. Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak	4										3	1		1	3	
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>									<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			
5	Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur	1. Administrator	1						1			1			1			
		2. Pengawas																
		3. JFT, Perencana Ahli Muda	2						2				2			1	1	
		4. JFT, Arsiparis Ahli Muda																
		5. Pelaksana/Fungsional Umum	3			1	1	1					2	1		2	1	
		6. PPPK																
		7. Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak	4										1	3		2	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>									<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>			
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1. Administrator	1						1			1			1			
		2. Pengawas																
		3. JFT, Perencana Ahli Muda	3						3				2	1		2	1	
		4. JFT, Arsiparis Ahli Muda																
		5. Pelaksana/Fungsional Umum	1				1						1			1		
		6. PPPK																
		7. Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak	4										1	3		1	3	
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>									<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>			
<b>Total Seluruh Pegawai</b>			<b>63</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	

## 1.6 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Jambi memiliki gedung kantor yang terletak di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Kelurahan Paal V Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, dan memiliki prasarana pendukung yang memadai, seperti ruang kerja, ruang rapat dan

aula yang dilengkapi dengan meja kursi rapat dan peralatan *sound sistem* dan multimedia, ruang arsip, ruang sholat, ruang laktasi, fasilitas komputer beserta jaringan internet dengan total 300MBPs, meja-kursi dan mebeluer, jaringan listrik dengan daya 72.650 KWh dan dilengkapi dengan genset berkapasitas 20 KVA, toilet dengan sumber air bersih dari PAM dan sumur bor, serta peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya, termasuk area parkir yang luas, taman kantor yang tertata dan terpelihara dengan baik.

Secara garis besar gambaran sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi BAPPEDA Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2.  
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Bappeda Kota Jambi

No.	Aset /Sarpras	Jumlah Barang	Satuan	Keadaan Barang		
				B	KB	RB
1	Bangunan Kantor	2	Unit	2	-	-
2	Bangunan Pendukung	3	Unit	3	-	-
3	Kendaraan Roda 4	7	Unit	7	-	-
4	Kendaraan Roda 2	21	Unit	21	-	-
5	Meja Kerja	120	Unit	70	30	20
6	Kursi Kerja Roda Putar	91	Unit	60	25	6
7	Meja Rapat	39	Unit	39	-	-
8	Kursi Rapat Biasa	240	Unit	194	32	14
9	Kursi Rapat	30	Unit	30	-	-
10	Filling Cabinet Arsip	17	Unit	10	-	7
11	Lemari Arsip	12	Unit	1	4	7
12	Lemari Kaca	22	Unit	1	-	-
13	Meja-Kursi Tamu	12	Set	8	4	-
14	Kursi Tunggu	2	Unit	2	-	-
15	AC Standing	7	Unit	7	-	-
16	AC Split ½ PK	3	Unit	3	-	-
17	AC Split 1 PK	1	Unit	1	-	-

Lanjutan .....

No.	Aset /Sarpras	Jumlah Barang	Satuan	Keadaan Barang		
				B	KB	RB
18	AC Split 2 PK	44	Unit	34	2	8
19	Genset	2	Unit	1	1	-
20	Komputer Server	2	Unit	1	-	1
21	Rak Server	1	Unit	1	-	-
22	Komputer PC	67	Unit	33	10	24
23	Notebook/Laptop	55	Unit	29	4	22
24	Printer	121	Unit	28	6	87
25	Monitor Seamless	12	Unit	11	-	1
26	Proyektor	8	Unit	3	-	5
27	Board Touch Screen / Flip Chart	4	Unit	4	-	-
28	UPS	23	Unit	12	3	8
29	CCTV 25 channel	1	Unit	1	-	-
30	CCTV 8 channel	1	Unit	1	-	-
31	Televisi	10	Unit	7	3	-
32	Sound System	4	Set	2	-	2
33	Telepromter	1	Unit	1	-	-
34	Wireless Presentation System	1	Unit	1	-	-
35	Microtik	1	Unit	1	-	-
36	Router	15	Unit	10	-	5
37	Mesin Presensi	2	Unit	1	-	1
38	Kamera Digital	23	Unit	6	2	15
39	Drone + Kamera	2	Set	1	1	-
40	Exhause Fan	14	Unit	14	-	-
41	Gorden/Vertical Blind	3	Set	1	1	1
42	Brankas	1	Unit	1	-	-
43	Faximile	3	Unit	1	-	2
44	Mesin FABX	1	Unit	-	1	-
45	Scanner	4	Unit	1	-	3
46	Mesin Laminating	1	Unit	1	-	-
47	Acces control	16	Unit	8	-	8
48	Running Text	1	Unit	1	-	-
49	Kursi roda untuk difabel	1	Unit	1	-	-
50	Mesin Pompa Air	5	Unit	3	-	2



## **1.7 Keuangan**

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023, BAPPEDA Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah, yang dialokasikan sebesar Rp. 11.776.405.100,-, yaitu untuk urusan Perencanaan sebesar Rp.11.084.240.370,- dan untuk urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp.692.164.730,- Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kota Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini berisi tentang berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan (IKU, Target kinerja, Formulasi yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Jambi)

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi tentang uraian hasil pengukuran capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan analisis akuntabilitas kinerja.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini berisikan tentang capaian kinerja BAPPEDA Kota Jambi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis BAPPEDA Kota Jambi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BAPPEDA Kota Jambi.

Pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, termasuk didalamnya permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### **3.2 Akuntabilitas Keuangan**

Bab ini berisi informasi tentang pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BAPPEDA Kota Jambi serta pertanggungjawaban keuangan dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan umum terhadap pencapaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan BAPPEDA Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN**

Bab ini berisi Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi, Inovasi dan Penghargaan yang diperoleh tahun 2023, serta data informasi penting lainnya.

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

*Bab ini berisi tentang berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan (IKU, Target kinerja, Formulasi yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Jambi)*

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bappeda Kota Jambi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BAPPEDA beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kota Jambi 2018-2023, yang telah di revisi Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Stategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023.

Perumusan Renstra BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2018-2023 tersebut tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJM DP)

Pemerintah Kota Jambi 2018-2023 merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah **“Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima.”**

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam upaya pencapaian melalui 5 (lima) misi yakni :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan; dan
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2018 –2023, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, BAPPEDA Kota Jambi mendukung misi pertama yaitu “Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi”.

## **2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran tersebut ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Sesuai *cascade* kinerja, BAPPEDA Kota Jambi mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK, dengan indikator sasaran RPJMD yaitu Nilai SAKIP dengan target pada tahun 2023 adalah nilai BB.

### **2.1.1 Tujuan BAPPEDA Kota Jambi**

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Bappeda Kota Jambi selama 5 tahun anggaran dari Tahun 2018 sampai dengan 2023 adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”.

### **2.1.2 Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi**

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Jambi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, tentunya BAPPEDA Kota Jambi memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kota Jambi, yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kurun waktu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan BAPPEDA Kota Jambi dalam kurun waktu lima tahun bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Jambi.

Penjabaran atas keterkaitan tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Jambi dengan RPJMDP Kota Jambi, dipresentasikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.  
Cascading Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi 2018-2023 ke Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kota Jambi 2018-2023

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan BAPPEDA	Sasaran Strategis BAPPEDA
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik  <u>Indikator</u> : Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah berbasis TIK  <u>Indikator</u> : Nilai SAKIP Kota Jambi	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan</b>	1. Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
			2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan
			3. Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah

Selanjutnya, tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Jambi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kota Jambi 2018-2023, dilalukan dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Kota Jambi 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan</b>  <u>Indikator</u> : <b>Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP)</b>	1. Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan.  <u>Indikator</u> : Nilai <i>Capaian SAKIP Kota pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja</i>	Mengoptimalkan kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah	Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah untuk merumuskan formulasi indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target daerah
			Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan <i>crosscutting</i> kinerja antar perangkat daerah
			Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan dengan perangkat daerah dan lintas

TUJUAN	SASARAN	STATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
			Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat Holistik, Tematik, Integratif & Spasial (THIS)
	2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan.	Meningkatkan peranan Bappeda dalam koordinasi, sinkronisasi evaluasi dan pengendalian perencanaan penganggaran	Pemberdayaan sumber daya aparatur perencana perangkat daerah
	<i>Indikator : Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD</i>		Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan analisis faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap indikator pembangunan
			Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD
	3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah.	Meningkatkan kualitas hasil penelitian/kajian untuk perencanaan pembangunan daerah	Melibatkan unsur perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli profesional agar analisa data dan informasi lebih berkualitas
	<i>Indikator : Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan</i>	Meningkatkan kualitas inovasi untuk daya saing daerah	Membuka dan memperluas forum kelitbangan guna menjangkau masukan, ide serta inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			Pembinaan dalam perumusan inovasi daerah agar dapat dimanfaatkan secara luas

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat melalui pencapaian indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.  
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja  
BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2019-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai Capaian SAKIP Kota pada Komponen Perencanaan Kinerja	Berdasarkan Penilaian MenPAN RB atas komponen <b>perencanaan kinerja</b> pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan	21,85	22,01	22,30	22,43	22,64
	Nilai Capaian SAKIP Kota pada Komponen Pengukuran Kinerja	Berdasarkan Penilaian MenPAN RB atas komponen <b>pengukuran kinerja</b> pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan	15,75	15,90	16,00	16,20	16,40
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPD	Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti untuk kebijakan daerah	100%	100%	100%	100%	100%

### 2.1.3 Struktur Program Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran BAPPEDA Kota Jambi tahun 2023 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.4  
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung  
Pencapaian Sasaran BAPPEDA Kota Jambi

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD & RKPD) 2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD & RKPD)
		Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam) 1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD) 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD) 4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD) 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN
		2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1. Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 2. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
		Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2. Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Tabel 2.5  
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran BAPPEDA Kota Jambi

PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan perangkat daerah akan lebih baik, sehingga semua kegiatan jelas arah dan tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disusun mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. merupakan komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Bappeda sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Walikota Jambi sebagai pihak kedua selaku pemberi amanah.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Tahun 2018-2023. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan Kepala Bappeda tahun 2023 meliputi 3 sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (*cascading*) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV/Jabatan Fungsional. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kota Jambi dengan Walikota Jambi yang merepresentasikan kinerja instansi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	22,64
		2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	16,40
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	3. Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	Persen	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	4. Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persen	100%

Selanjutnya, penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS) ke Program, yang menjadi tugas jabatan administrator untuk pencapaian Indikator Program dan Target tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Target Indikator Program BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENGAMPU
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada komponen Perencanaan Kinerja	Angka	25,50	Kabid. PPM dan Kabid. PSI
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada komponen Pengukuran Kinerja	Angka	16,99	Kabid. PPM dan Kabid. PSI
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	Kabid. PPEPD
3	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persen	100%	Kabid. Litbang
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BAPPEDA	Nilai	BB	Sekretaris

Untuk pencapaian target indikator kinerja program, ditunjukkan dari rata-rata pencapaian indikator kegiatan sebagaimana yang dituangkan secara berjenjang (*cascading*) yang menggambarkan pola *crosscutting* kinerja antar bidang dalam perjanjian kinerja pejabat administrator.

Tabel 2.8  
Target Indikator Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja</b>	<b>Angka</b>	<b>22,64 &amp; 16,40</b>
	1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Angka	25,23 & 16,34
	2. Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA	Angka	26,87 & 18,07
	3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Angka	24,40 & 16,57
2	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>
	1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu	Persen	100%
	2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Persen	100%
	3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100%
3	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>
	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian	Persen	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET
		peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah		
	2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kajian bidang sosial dan kependudukan yang sesuai dengan prioritas daerah	Persen	100%
	3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah	Persen	100%
	4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Angka	62
4	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai SAKIP BAPPEDA</b>	<b>Nilai</b>	<b>BB</b>
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Persen	100%
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Persen	100%
	3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100%
	4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	Persen	100%
	5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	Persen	100%
	6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100%
	7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%
	8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100%

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada anggaran tahun 2023 BAPPEDA Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan total anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Aggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.11.776.405.100,- terdiri dari :

1. Alokasi untuk melaksanakan urusan Perencanaan adalah sebesar Rp.11.084.240.370,- (94,12%) dengan rincian sebagai berikut :
  - Belanja Operasional sebesar Rp.10.668.525.673,- (90,59%)
  - Belanja Modal sebesar Rp. 415.714.697,- (3,53%)
  
2. Alokasi untuk melaksanakan urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp.692.164.730,- (5,88%) dengan rincian sebagai berikut :
  - Belanja Operasional sebesar Rp.692.164.730,- (5,88%)
  - Belanja Modal sebesar Rp. 0,- (0,0%)

Sedangkan pada anggaran perubahan tahun 2023 tidak mengalami perubahan alokasi anggaran atau tetap sebesar Rp.11.776.405.100,-. Secara keseluruhan, rincian belanja BAPPEDA Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9.  
Target Belanja BAPPEDA Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2023

URAIAN	TARGET	PERSENTASE (%)
Belanja Operasional	Rp. 11.360.690.403,-	96,47
Belanja Modal	Rp. 415.714.697,-	3,53
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 11.776.405.100,-</b>	<b>100</b>

#### **2.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2023 BAPPEDA Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:



Tabel 2.10  
 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi  
 pada APBD Perubahan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	PERSENTASE (%)
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.161.751.910,-	9,87
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.539.534.235,-	72,51
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.382.954.225,-	11,74
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	692.164.730,-	5,88

Alokasi anggaran pada 4 (empat) program tersebut digunakan untuk membiayai 18 (delapan belas) kegiatan yang ada di BAPPEDA Kota Jambi sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel 2.11.  
 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
	<b>URUSAN PERENCANAAN</b>	<b>11.084.240.370</b>	<b>94,12</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.539.534.235</b>	<b>72,51</b>
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	436.679.084	3,71
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.885.636.481	41,49
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	54.498.320	0,46
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	437.652.400	3,72
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.078.762.040	9,16

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	368.540.585	3,13
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.710.325	5,38
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.055.000	5,47
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.382.954.225</b>	<b>11,74</b>
	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	887.993.685	7,54
	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	244.972.384	2,08
	3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	249.988.156	2,12
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.161.751.910</b>	<b>9,87</b>
	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	517.186.777	4,39
	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	221.191.806	1,88
	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	423.373.327	3,60
	<b>URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>692.164.730</b>	<b>5,88</b>
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>692.164.730</b>	<b>5,88</b>
	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	143.479.150	1,22
	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	99.381.181	0,84
	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	98.949.606	0,84
	4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	350.354.793	2,98
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>11.776.405.100</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran pada kegiatan merupakan akumulasi dari sub kegiatan pada masing-masing kegiatan mempertimbangkan *logical framework* sebagai upaya mewujudkan pencapaian target indikator kinerja kegiatan (*outcome*) dan pencapaian target indikator kinerja program sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2.8.

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

*Bab ini berisi tentang uraian hasil pengukuran capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan analisis akuntabilitas kinerja.*

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

### 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Perhitungan persentase pencapaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan predikat capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu :

Tabel 3.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO.	PERSENTASE	PREDIKAT
1	<100%	Tidak Tercapai
2	=100%	Tercapai/Sesuai Target
3	>100%	Melebihi Target

Selanjutnya, Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang teruat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.2. Kategori Nilai Capaian Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KATEGORI	KODE
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Orange
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

### 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling strategis dibandingkan

indikator lainnya. IKU merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran strategis. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Jambi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3.  
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% CAPAIAN	Kategori
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,64	23,01	101,63%	Sangat Tinggi
		2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,40	19,35	117,99%	Sangat Tinggi
				Rata-rata	109,81%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	Masih dalam pengumpulan data capaian pada OPD	Belum dapat dihitung	.....
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Total Capaian</b>					<b>104,91%**)</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Ket : \*\*) perhitungan sementara karena Capaian Sasaran 2 belum ada (masih dalam pengumpulan data)

Mencermati data yang ditampilkan pada tabel 3.3 maka dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan melampaui target. Untuk Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP Kota mencapai 23,01 dari target 22,64 atau ekuivalen dengan capaian 101,63%. Untuk Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP Kota realisasinya mencapai 19,35 dari target sebesar 16,40 atau setara dengan pencapaian 117,99 dari target.

Untuk pencapaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan sasaran startegis ketiga yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah target realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja BAPPEDA untuk mencapai sasaran strategis

yang ditetapkan telah berlangsung dengan sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi yang telah diperkirakan sebelumnya. Rata-rata total capaian yang mencapai 104,91% atau masuk dalam kategori sangat tinggi menunjukkan kapasitas kinerja yang ideal dan maksimal telah dapat diimplementasikan BAPPEDA pada tahun anggaran 2023.

### **3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Tahun 2023 ini merupakan tahun akhir dari Rencana Strategis Bappeda Kota Jambi 2018-2023. Rekapitulasi realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dipersentasikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2019 s.d 2023

No.	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	21,85	21,85	100,00%	22,01	22,23	101,00%	22,30	22,36	100,27%	22,43	22,84	101,83%	22,64	23,01	101,63%
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	15,75	15,75	100,00%	15,90	16,04	100,88%	16,00	16,10	100,63%	16,20	19,28	119,01%	16,40	19,35	117,99%
3	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	Persen	100	120,30	120,30%	100	99,45	99,45%	100	97,66	97,66%	100	108,20	108,20%	100		
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persen	-	-	-	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

Ket : penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD 2023 masih dalam tahap pengumpulan data capaian RPJMD yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEDA dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya pada Indikator Kinerja Utama yang ketiga yaitu Persentase realisasi capaian indikator Sasaran RPJMD yang realisasinya tidak sesuai target pada tahun 2020 dan 2021. Kondisi tersebut dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan adanya perubahan kebijakan dan *refocusing* anggaran yang diutamakan untuk mengatasi pandemi dan efek pasca pandemi.

Data yang tersaji pada tabel menunjukkan adanya korelasi positif pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA. Capaian tersebut menunjukkan bahwa interaksi dan sinergi kerja BAPPEDA telah mampu menterjemahkan pencapaian target dengan kinerja yang optimal dan konsisten.

Tabel 3. 5.  
Peringkat Nilai Capaian Indikator Kinerja

NO	PERINGKAT KINERJA	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA
1	Sangat Tinggi	3	3**
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-
Jumlah		3	3

Ket : \*\*) sementara, karena masih ada indikator sasaran yang belum selesai penghitungannya

Dengan demikian, pencapaian kinerja 3 sasaran sebagaimana dipresentasikan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.5 tersebut, menggambarkan bahwa pencapaian 2 indikator kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada pada peringkat **Sangat Tinggi**.

### 3.3.1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, BAPPEDA Kota Jambi dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing



indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023.

Hasil capaian masing-masing indikator kinerja sebagaimana yang telah disajikan pada tabel 3.3. Adapun analisis terhadap masing-masing indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

**SASARAN STRATEGIS 1** yaitu Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan, dengan Indikator Sasaran yaitu Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja berdasarkan Penilaian MenPAN-RB tahun-n.

Sebagaimana surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan No: B/227/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa bahwa evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi menunjukkan nilai sebesar 68,35 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 3.6  
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Jambi  
Tahun 2023 oleh Kementerian PAN-RB

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	Penanggungjawab
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,01	BAPPEDA
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,35	
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,73	Bagian.Organisasi
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,26	Inspektorat
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>68,35</b>	
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>	

Berdasarkan rincian pada tabel 3.3 terlihat bahwa hasil capaian Sasaran Stategis 1 telah melebihi target indikator sasaran yang ditetapkan yaitu capaian nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 101,63% dan capaian nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 117,99%, dengan akumulasi keberhasilan seluruhnya sebesar 109,81%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, pada tabel 3.5 tergambar adanya peningkatan yang positif

terhadap capaian kinerja untuk nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 100,74% dan untuk nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 100,76%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dijelaskan bahwa terdapat perubahan bobot penilaian komponen dan sub komponen (sebelumnya Permen PAN-RB No. 12 Tahun 2015) sehingga hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sejak Permen PAN-RB No. 88 Tahun 2021 diberlakukan tidak dapat dibandingkan dengan hasil sebelum tahun 2022. Namun secara keseluruhan tergambar bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan akhir periode tahun perencanaan Renstra BAPPEDA Kota Jambi yaitu tahun 2023 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata capaian kinerja untuk nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 101,06% dan untuk nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 107,64%, atau dengan persentase capaian Sasaran Strategis 1 sebesar 104,35%. Dengan demikian kategori untuk capaian kinerja Sasaran Strategis 1 adalah **Sangat Tinggi**.

Adapun faktor keberhasilan ini karena BAPPEDA Kota Jambi mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan target/indikator Sasaran Pemerintah Daerah sehingga rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan berbagai upaya perbaikan, antara lain:

- a. Bersama Inspektorat Kota Jambi dan Bagian Organisasi Setda Kota Jambi sebagai penanggungjawab capaian indikator Sasaran Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi, melaksanakan evaluasi internal atas implementasi SAKIP pada 39 Perangkat Daerah.
- b. Memperbaiki dan mereviu RPJMD Kota Jambi 2018-2023 dengan sasaran yang lebih berorientasi hasil;
- c. Melaksanakan asistensi/pembinaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja kepada Perangkat Daerah;
- d. Menyusun pedoman evaluasi AKIP internal melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi;

Sedangkan faktor-faktor yang yang masih perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Jambi pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja, antara lain:

- a) Sasaran Strategis Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah yang berorientasi hasil dan menggambarkan kinerja yang sesuai serta memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*)
- b) *Cascading*/penjenjangan kinerja level Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*, serta menggambarkan pola *crosscutting* kinerja antar bidang serta tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- c) IKU Perangkat Daerah lebih spesifik dan dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data yang relevan untuk menggambarkan capaian kinerja.
- d) Monitoring dan evaluasi yang berorientasi capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan ssebagai penentuan anggaran program dan kegiatan.

Anggaran dan realisasi tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Sasaran 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7  
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan pada Sasaran Strategis 1

Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.161.751.910,-</b>	<b>963.786.961,-</b>	<b>82,96</b>
	1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	517.186.777,-	472.560.508,-	91,37
	2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	221.191.806,-	167.891.803,-	75,90

Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	423.373.327,-	323.334.650,-	75,37
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>8.539.534.235,-</b>	<b>7.314.842.020,-</b>	<b>85,66</b>
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	436.679.084,-	300.210.530,-	68,75
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.885.636.481,-	4.501.058.691,-	92,13
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	54.498.320,-	54.465.800,-	99,94
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	437.652.400,-	249.366.159,-	56,98
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.078.762.040,-	851.091.158,-	78,90
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	368.540.585,-	351.910.000,-	95,94
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah	633.710.325,-	447.856.213,-	70,67
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.055.000,-	558.883.469,-	86,78

Sumber Data : Laporan Keuangan BAPPEDA Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka menunjang pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kota Jambi, tentunya juga merupakan kewajiban BAPPEDA Kota Jambi untuk meningkatkan peran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dengan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil sebagai rencana aksi antara lain :

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan dan *cascading* kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap manajemen kinerja OPD terkait dengan perencanaan dan pengukuran kinerja, sehingga capaian nilai akuntabilitas kinerja yang sudah baik dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan;
- 3) Meningkatkan intensitas koordinasi, asistensi/pembinaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja kepada Perangkat Daerah.
- 4) Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan Inspektorat Kota Jambi dan Bagian Organisasi Setda Kota Jambi untuk mengoptimalkan capaian nilai akuntabilitas Pemerintah Kota Jambi.
- 5) Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan.

**SASARAN STRATEGIS 2** yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan, mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD, dengan formulasi yaitu :

$$\frac{\% \text{ Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran RPJMD}}{\Sigma \text{ Indikator Sasaran yang sudah di rilis}} \times 100\%$$

Berdasarkan rincian pada tabel 3.3 terlihat bahwa hasil capaian Sasaran Strategis 2 belum dapat di tampilkan karena masih dalam tahap pengumpulan data capaian RPJMD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dengan demikian, realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena akumulasi perhitungan tahun 2022 sudah sesuai dengan seluruh Indikator Sasaran pada RPJMD yang telah dirilis.

Pada tabel 3.4 tergambar bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 (akhir periode Renstra BAPPEDA Kota Jambi), indikator Sasaran Strategis 2 ini di tahun 2020-2021 tidak memehuni target dikarenakan adanya Sasaran RPJMD yang dilaksanakan oleh beberapa OPD tidak tercapai target, meskipun tidak begitu signifikan. Hal ini

disebabkan 2 tahun tersebut diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemi* COVID-19.

Adapun faktor keberhasilan ini karena berbagai upaya telah dilakukan BAPPEDA Kota Jambi mewujudkan target/indikator Sasaran Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah;
- b. Melakukan asistensi/pembinaan secara berkesinambungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan tahunan dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*; dan penyusunan dokumen anggaran Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan prioritas anggaran yang mendukung pencapaian target sasaran RPJMD, target IKU Perangkat Daerah, target SPM, target SDGs maupun target IKK.

Sedangkan faktor-faktor yang masih perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan capaian indikator sasaran RPJMD yaitu :

- a. Konsistensi Perangkat Daerah dalam menyusun kegiatan yang berorientasi hasil, terutama kegiatan-kegiatan pada *crosscutting* program.
- b. Memanfaatkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja sasaran dalam input perencanaan Perangkat Daerah.

Anggaran dan realisasi tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran 2 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8  
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan pada Sasaran Strategis 2

Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1.382.954.225,-</b>	<b>1.240.215.783,-</b>	<b>89,28</b>
	1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	887.993.685,-	871.855.040,-	98,18

	2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	244.972.384,-	160.628.790,-	65,57
	3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	249.988.156,-	207.731.953,-	83,10

Sumber Data : Laporan Keuangan BAPPEDA Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

Sebagai institusi yang berperan dan bertanggungjawab terhadap urusan Perencanaan Pembangunan, BAPPEDA berkewajiban untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, langkah-langkah antisipatif yang akan diambil sebagai rencana aksi yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan antara lain :

1. Secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja OPD terkait dengan perencanaan dan pengukuran kinerja;
2. Melakukan rewiu dan perbaikan dokumen perencanaan dan *cascading* kinerja Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan intensitas koordinasi, asistensi/pembinaan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah.

**SASARAN STRATEGIS 3** yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah, mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg diirekomendasikan untuk rumusan kebijakan}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian}} \times 100\%$$

Berdasarkan rincian pada tabel 3.3 terlihat bahwa hasil capaian Sasaran Strategis 3 ini setiap tahunnya telah sesuai target indikator sasaran yang ditetapkan yaitu 100%. Dengan demikian kategori untuk capaian kinerja Sasaran Strategis 3 ini juga **Sangat Tinggi**.

Perencanaan akan lebih baik jika dilaksanakan berdasarkan penelitian terlebih dahulu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada dalam

masyarakat, sehingga diharapkan pada saat pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun faktor keberhasilan ini karena BAPPEDA Kota Jambi yang juga berperan terhadap urusan penelitian dan pengembangan, sehingga kajian kelitbang yang disusun merupakan kajian terhadap isu-isu ataupun permasalahan pembangunan di Kota Jambi yang relevan dengan kebutuhan dalam penyusunan kebijakan pada dokumen perencanaan daerah. Rekomendasi dari hasil kajian 2023 yang ditindaklanjuti dalam perumusan kebijakan disajikan pada bagian lampiran laporan ini.

Sedangkan faktor-faktor yang masih perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan hasil kajian yaitu :

- a. Kualifikasi kompetensi tenaga ahli/konsultan yang dipilih untuk menyusun kajian;
- b. Kualitas analisis isu dan permasalahan agar lebih kritis dengan berbagai sudut pandang.

Anggaran dan realisasi tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran 2 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9.  
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan pada Sasaran Strategis 3

Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>692.164.730,-</b>	<b>642.134.494,-</b>	<b>92,77</b>
	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	143.479.150,-	127.898.774,-	89,14
	2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	99.381.181,-	95.869.000,-	96,47
	3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	98.949.606,-	98.901.101,-	99,95
	4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	350.354.793,-	319.465.619,-	91,18

Sumber Data : Laporan Keuangan BAPPEDA Kota Jambi Tahun Anggaran 2023



Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil sebagai rencana aksi yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan antara lain :

1. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan
2. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

### **3.3.2. Membandingkan Realisasi Kinerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

BAPPEDA tidak termasuk dalam OPD yang berkewajiban untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Perundang-undangan, maupun pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka untuk poin perbandingan dengan standar nasional tidak ada/nihil.

### **3.3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

#### **1. Sumber Daya Aparatur**

Dengan keterbatasan sumberdaya aparatur sebagaimana dijelaskan pada Bab II, keberhasilan memenuhi capaian target sasaran didukung oleh :

- 1) Komitmen yang kuat dari kepala Badan untuk membenahan manajemen BAPPEDA;
- 2) Komitmen seluruh personil BAPPEDA untuk meningkatkan kinerja;
- 3) Integritas dan loyalitas pegawai BAPPEDA yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya;
- 4) Kapasitas dan kompetensi personel BAPPEDA yang memadai ditinjau dari sisi pendidikan dan pengalaman;
- 5) Tingkat disiplin pegawai BAPPEDA dan kesadaran akan etika organisasi.

Meskipun demikian BAPPEDA juga mengakui masih lemahnya koordinasi dalam beberapa bidang yang dilakukan masih belum optimal, dan ini merupakan tugas perbaikan di masa yang akan datang.

## **2. Sumber Daya Anggaran**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada Bappeda Kota Jambi mempunyai 1 tujuan dan 3 sasaran serta 4 indikator sasaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.776.405.100,-. Berikut disajikan efisiensi anggaran terhadap capaian tujuan dan sasaran.

Tabel 3.10.  
Efisiensi Penggunaan Anggaran dengan Hasil (Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Program	Anggaran			
			Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,64	23,01	101,63	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.161.751.910,-	963.786.961,-	82,96	
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,40	19,35	117,99					
							2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8.539.534.235,-	7.314.842.020,-	85,66
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	Masih dalam pengumpulan data capaian pada OPD	Belum dapat dihitung	3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.382.954.225,-	1.240.215.783,-	89,68	
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	692.164.730,-	642.134.494,-	92,77	
	Rata-rata Capaian Kinerja				Belum dapat dihitung	Jumlah	11.776.405.100,-	10.160.979.258,-	86,28	
									Efisiensi	13,72

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran Bappeda Kota Jambi melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran dari total belanja program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp. 11.776.405.100,- terealisasi Rp.10.160.979.258,- atau 86,28% dan efisiensi sebesar 13,72% yang bersumber dari laporan keuangan Bappeda Kota Jambi Tahun 2023.

#### **3.3.4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023 sebagai berikut :

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023

No	Uraian Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja	Target		Realisasi				Permasalahan
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	% Keu	% Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP BAPPEDA (Satuan: Nilai)</b>	<b>A</b>	<b>8.539.534.235</b>	Belum di nulis Inspektora	<b>7.314.842.020</b>	<b>85,66</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>436.679.084</b>	<b>100%</b>	<b>300.210.530</b>	<b>68,75</b>		
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	7	82.700.896	7	81.391.530	98,42	100	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan: Laporan)	3	353.978.188	3	218.819.000	61,82	100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Keuangan (Satuan: Persen)</b>	<b>100%</b>	<b>4.885.636.481</b>	<b>100%</b>	<b>4.501.058.691</b>	<b>92,13</b>		
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: org/bln)	37	4.476.452.651	37	4.118.777.481	92,01	100	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	2	353.675.354	2	333.278.030	94,23	100	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	2	25.749.256	2	22.043.880	85,61	100	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	12	29.759.220	12	26.959.300	90,59	100	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Satuan: Persen)</b>	<b>100%</b>	<b>54.498.320</b>	<b>100%</b>	<b>54.465.800</b>	<b>99,94</b>		
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	1	54.498.320	1	54.465.800	99,94	100	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Kepegawaian (Satuan: Persen)</b>	<b>100%</b>	<b>437.652.400</b>	<b>100%</b>	<b>249.366.159</b>	<b>56,98</b>		
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (Satuan: Paket)	2	117.937.500	2	109.520.000	92,86	100	

No	Uraian Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja	Target		Realisasi				Permasalahan
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	% Keu	% Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Laporan Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kpegawaian (Satuan: Dokumen)	3	128.860.200	3	87.058.600	67,56	100	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat (Satuan: Orang)	37	102.500.000	16	6.400.000	6,24	43	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peraturan PerUU (Satuan: Orang)	4	88.354.700	3	46.387.559	52,50	75	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Umum (Satuan: Persen)</b>	<b>100%</b>	<b>1.078.762.040</b>	<b>100%</b>	<b>851.091.158</b>	<b>78,90</b>		
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Satuan: Paket)	1	85.871.286	1	85.859.975	99,99	100	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Satuan: Paket)	5	50.505.000	5	50.250.000	99,50	100	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Satuan: Paket)	6	250.102.205	6	231.965.200	92,75	100	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Satuan: Paket)	2	52.818.851	2	52.503.150	99,40	100	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Satuan: Paket)	1	2.500.000	0	0	0,00	0	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	1	50.223.900	1	11.631.300	23,16	100	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	1	535.800.000	1	376.196.282	70,21	100	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	1	50.940.798	1	42.685.251	83,79	100	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah (Satuan: Persen)</b>	<b>100%</b>	<b>368.540.585</b>	<b>100%</b>	<b>351.910.000</b>	<b>95,49</b>		
01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Satuan: Unit)	12	368.540.585	12	351.910.000	95,49	100	

No	Uraian Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja	Target		Realisasi				Permasalahan
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	% Keu	% Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satuan: Persen)</b>	<b>100%</b>	<b>633.710.325</b>	<b>100%</b>	<b>447.856.213</b>	<b>70,67</b>		
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)	1	47.337.925	1	24.622.800	52,01	100	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Satuan: Laporan)	1	328.000.000	1	277.704.013	84,67	100	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Satuan: Laporan)	1	111.000.000	1	6.407.000	5,77	100	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Satuan: Laporan)	1	147.372.400	1	139.122.400	94,40	100	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Satuan: Persen)</b>	<b>100%</b>	<b>644.055.000</b>	<b>100%</b>	<b>558.883.469</b>	<b>86,78</b>		
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	22	238.190.000	22	206.273.784	86,60	100	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Satuan: Unit)	8	50.670.000	8	46.024.000	90,83	100	
03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	65	82.960.000	65	50.767.125	61,19	100	
04	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	3	60.000.000	3	58.566.500	97,61	100	
05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diherabilitasi (Satuan: Unit)	3	197.735.000	3	186.077.060	94,10	100	
06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diherabilitasi (Satuan: Unit)	33	14.500.000	33	11.175.000	77,07	100	

No	Uraian Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja	Target		Realisasi				Permasalahan
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	% Keu	% Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Satuan: Persen)</b>	<b>100%</b>	<b>1.382.954.225</b>	<b>100%</b>	<b>1.240.215.783</b>	<b>89,68</b>		
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Terlaksananya Penyusunan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu (Satuan : Persen)</b>	<b>100%</b>	<b>887.993.685</b>	<b>100%</b>	<b>871.855.040</b>	<b>98,18</b>		1. Lambatnya respon Perangkat Daerah utk melengkapi data yang dibutuhkan perencanaan. 2. Ketersediaan data dasar dan data teknis yang masih minim. 3. Data belum terverifikasi dengan baik sehingga banyak yang berbeda-beda 4. Pencapaian Sasaran Colaboratif belum optimal karena masih adanya ego sektoral untuk alokasi anggaran program kegiatan internal PD, dan 5. Analisis usulan program dan kegiatan OPD belum optimal sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara output dan outcome yang dihasilkan untuk mencapai tujuan dan sasaran IKU.
01	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Satuan: Berita Acara)	1	379.999.928	1	375.764.880	98,89	100	
02	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RP JPD/RP JMD/RKPD) (Satuan: Dokumen)	6	507.993.757	6	496.090.160	97,66	100	
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Terlaksananya ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Satuan: Persen)</b>	<b>100%</b>	<b>244.972.384</b>	<b>100%</b>	<b>160.628.790</b>	<b>65,57</b>		
01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Satuan: Dokumen)	2	195.000.659	2	123.109.615	63,13	100	
02	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Satuan: Dokumen)	1	49.971.725	1	37.519.175	75,08	100	
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Satuan : persen)</b>	<b>100%</b>	<b>249.988.156</b>	<b>100%</b>	<b>207.731.953</b>	<b>83,10</b>		
01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Satuan: Laporan)	1	30.196.696	1	14.174.100	46,94	100	
02	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Satuan: Laporan)	3	219.791.460	3	193.557.853	88,06	100	



No	Uraian Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja	Target		Realisasi				Permasalahan
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	% Keu	% Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA KOMPONEN PERENCANAAN &amp; PENGUKURAN KINERJA</b> (Satuan: Angka)	<b>22,64 &amp; 16,40</b>	<b>1.161.751.910</b>	Belum di nllis Inspektora t	<b>963.786.961</b>	<b>82,96</b>		
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b> (Satuan: Angka)	<b>25,53 &amp; 16,34</b>	<b>517.186.777</b>	Belum di nllis Inspektora t	<b>472.560.508</b>	<b>91,37</b>		1. Masih ada Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria SMART 2. Perhitungan indikator kinerja masih ada yang belum berdasarkan data yang jelas 3. Masih ada kegiatan pada Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	96.062.872	2	88.538.708	92,17	100	
02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	4	421.123.905	4	384.021.800	91,19	100	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA</b> (Satuan: Angka)	<b>26,87 &amp; 18,07</b>	<b>221.191.806</b>	Belum di nllis Inspektora t	<b>167.891.803</b>	<b>75,90</b>		
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2	111.013.745	2	90.590.541	81,60	100	
02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Satuan: Perangkat Daerah)	6	21.777.207	6	10.516.162	48,29	100	
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	74.541.292	2	57.538.600	77,19	100	

No	Uraian Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			Permasalahan	
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	% Keu		% Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Satuan: Perangkat Daerah)	2	13.859.562	2	9.246.500	66,72	100	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Satuan: Angka)</b>	<b>24,40 &amp; 16,57</b>	<b>423.373.327</b>	Belum di nilai Inspektora t	<b>323.334.650</b>	<b>76,37</b>		
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	219.682.671	2	187.340.350	85,28	100	
02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Satuan: Perangkat Daerah)	5	203.690.656	5	135.994.300	66,77	100	
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN (Satuan: Persen)</b>	<b>100%</b>	<b>692.164.730</b>	<b>100%</b>	<b>642.134.494</b>	<b>92,77</b>		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (Satuan: Dokumen)	100%	143.479.150	100%	127.898.774	89,14		Ketersediaan data dasar dan data teknis yang masih minim dan belum terverifikasi dengan baik sehingga analisis kajian belum optimal
04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Satuan: Laporan)	2	143.479.150	2	127.898.774	89,14	100	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan (Satuan: Rekomendasi)	100%	99.381.181	100%	95.369.000	96,47		

No	Uraian Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			Permasalahan	
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	% Keu		% Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Aspek- Aspek Sosial (Satuan: Dokumen)	2	99.381.181	2	95.869.000	96,47	100	
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Satuan: Rekomendasi)</b>	<b>100%</b>	<b>98.949.606</b>	<b>100%</b>	<b>98.901.101</b>	<b>99,95</b>		
01	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Satuan: Dokumen)	1	45.949.707	1	45.933.507	99,96	100	
2	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Satuan: Dokumen)	1	52.999.899	1	52.967.594	99,94	100	
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Nilai Indeks Inovasi Daerah (Satuan: Angka)</b>	<b>62</b>	<b>350.354.793</b>	<b>62,36</b>	<b>319.465.619</b>	<b>91,18</b>		
01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Satuan: Dokumen)	1	110.741.705	1	101.571.646	91,72	100	1. Belum optimalnya pemenuhan data data pendukung yang diperlukan dalam penilaian IGA (Innovative Government Award).
02	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Satuan: Laporan)	1	239.613.088	1	217.893.973	90,94	100	2. Terbatasnya data dan informasi yang disajikan perangkat daerah untuk keperluan perencanaan inovasi daerah.

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

#### 3.4.1. Realisasi Anggaran

Pagu total belanja BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebesar Rp.11.776.405.100,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.10.160.979.258,- atau sebesar 86,28%, yaitu:

Tabel 13.12.  
Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Tahun 2023

Urusan	Anggaran		Realisasi	
	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Operasional	Belanja Modal
Perencanaan	10.668.525.673,-	415.714.697,-	9.119.884.764,- (85,48%)	398.960.000,- (95,97%)
Penelitian dan Pengembangan	692.164.730,-	0,-	642.134.494,- (92,77%)	0,- (0,0%)
<b>Jumlah</b>	<b>11.360.690.403,-</b>	<b>415.714.697,-</b>	<b>9.762.019.258,- (85,93%)</b>	<b>398.960.000,- (95,97%)</b>
	<b>11.776.405.100,-</b>		<b>10.160.979.258,- (86,28%)</b>	

Rincian realisasi masing-masing belanja tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.13.

**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BAPPEDA Kota Jambi  
Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% CAPAIAN 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.776.405.100</b>	<b>10.160.979.258,00</b>	<b>86,28</b>	<b>10.330.202.160,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.360.690.403</b>	<b>9.762.019.258,00</b>	<b>85,93</b>	<b>9.436.343.436,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	4.712.984.651	4.348.637.481,00	92,27	4.330.391.678,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.781.994.276	2.523.950.704,00	90,72	2.595.118.481,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.000.349.600	1.842.268.285,00	92,10	1.861.400.500,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.000.349.600	1.842.268.285,00	92,10	1.861.400.500,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	177.405.624	175.902.976,00	99,15	181.887.415,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	177.405.624	175.902.976,00	99,15	181.887.415,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	144.539.000	115.990.000,00	80,25	135.430.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	144.539.000	115.990.000,00	80,25	135.430.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	100.160.000	90.550.000,00	90,41	70.600.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	100.160.000	90.550.000,00	90,41	70.600.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.000.000	42.410.000,00	81,56	41.670.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	52.000.000	42.410.000,00	81,56	41.670.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	117.600.520	107.254.020,00	91,20	110.657.760,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	117.600.520	107.254.020,00	91,20	110.657.760,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.190.100	3.956.388,00	94,42	1.543.148,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.190.100	3.956.388,00	94,42	1.543.148,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	55.000	32.175,00	58,50	28.624,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	55.000	32.175,00	58,50	28.624,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	167.988.778	130.395.882,00	77,62	176.554.787,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	167.988.778	130.395.882,00	77,62	176.554.787,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.426.660	3.797.712,00	85,79	3.836.526,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.426.660	3.797.712,00	85,79	3.836.526,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.278.994	11.393.266,00	85,80	11.509.721,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.278.994	11.393.266,00	85,80	11.509.721,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.694.458.375	1.594.826.777,00	94,12	1.521.681.197,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	929.799.838	886.765.958,00	95,37	1.521.681.197,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	929.799.838	886.765.958,00	95,37	1.521.681.197,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	288.871.003	288.871.003,00	100,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	288.871.003	288.871.003,00	100,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	475.787.534	419.189.816,00	88,10	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	475.787.534	419.189.816,00	88,10	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	236.532.000	229.860.000,00	97,18	213.592.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	217.332.000	210.660.000,00	96,93	194.392.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	183.132.000	178.860.000,00	97,67	186.232.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34.200.000	31.800.000,00	92,98	0,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	19.200.000	19.200.000,00	100,00	19.200.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	19.200.000	19.200.000,00	100,00	19.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.647.705.752	5.413.381.777,00	81,43	5.105.951.758,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.123.348.968	1.883.407.355,00	88,70	1.756.678.356,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.123.348.968	1.883.407.355,00	88,70	1.756.678.356,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	268.860.000	236.943.284,00	88,13	224.379.211,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.050.000	10.822.500,00	97,94	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	136.552.593	129.598.700,00	94,91	119.085.761,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	159.482.980	156.709.515,00	98,26	142.662.090,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% CAPAIAN 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	475.769.129	446.145.829,00	93,77	375.202.545,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.890.000	14.760.000,00	99,13	15.750.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	133.391.929	131.458.772,00	98,55	127.021.599,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	73.186.651	72.792.480,00	99,46	92.088.800,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	85.871.286	85.859.975,00	99,99	95.244.550,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	76.590.000	58.630.000,00	76,55	57.317.700,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.500.000	8.250.000,00	50,00	13.751.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.658.000	8.658.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	521.025.000	410.507.000,00	78,79	339.294.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	23.583.900	2.751.300,00	11,67	3.250.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	90.631.500	86.105.000,00	95,01	102.630.600,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0	0,00	0,00	49.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.318.000	11.700.000,00	76,38	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.988.000	11.715.000,00	97,72	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.327.033.784	1.861.821.713,00	80,01	1.830.026.790,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.133.820.000	1.787.498.513,00	83,77	1.554.313.787,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74.700.000	42.900.000,00	57,43	52.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0,00	0,00	34.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	20.100.000	19.800.000,00	98,51	24.600.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	30.000.000	24.000.000,00	80,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	947.854.000	772.174.000,00	81,47	650.644.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	81.900.000	67.500.000,00	82,42	52.034.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	432.000.000	372.000.000,00	86,11	273.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	94.800.000	94.800.000,00	100,00	94.800.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	15.866.000	15.866.000,00	100,00	15.866.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.600.000	6.600.000,00	100,00	6.600.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	79.000.000	78.800.000,00	99,75	78.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	24.000.000	0,00	0,00	14.050.545,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	16.000.000	11.457.825,00	71,61	8.810.250,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	240.000.000	232.304.400,00	96,79	165.949.455,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	48.000.000	33.941.788,00	70,71	23.472.050,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0	0,00	0,00	22.914.687,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.000.000	15.354.500,00	76,77	21.372.800,00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	6.713.784	6.283.200,00	93,59	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.713.784	6.283.200,00	93,59	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	59.500.000	59.100.000,00	99,33	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	59.500.000	59.100.000,00	99,33	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000	2.940.000,00	32,67	100.750.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	9.000.000	2.940.000,00	32,67	100.750.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	0,00	0,00	147.963.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0	0,00	0,00	48.118.500,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0	0,00	0,00	99.844.500,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	118.000.000	6.000.000,00	5,08	22.000.003,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% CAPAIAN 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	118.000.000	6.000.000,00	5,08	22.000.003,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	455.145.000	302.170.185,00	66,39	251.711.593,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	197.410.000	57.526.625,00	29,14	104.256.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0	0,00	0,00	40.218.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.500.000	14.175.000,00	81,00	4.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	111.000.000	6.407.000,00	5,77	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.450.000	7.321.000,00	24,04	21.458.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0	0,00	0,00	21.830.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	21.900.000	13.154.000,00	60,06	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	16.560.000	16.469.625,00	99,45	16.250.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	257.735.000	244.643.560,00	94,92	147.455.593,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	197.735.000	186.077.060,00	94,10	21.959.193,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	60.000.000	58.566.500,00	97,61	125.496.400,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.680.968.000	1.304.882.524,00	77,63	1.227.535.019,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.680.968.000	1.304.882.524,00	77,63	1.227.535.019,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.268.118.000	987.212.524,00	77,85	979.940.763,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	287.850.000	192.670.000,00	66,93	238.650.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	125.000.000	125.000.000,00	100,00	8.944.256,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.210.000	61.100.000,00	99,82	40.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.210.000	61.100.000,00	99,82	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	61.210.000	61.100.000,00	99,82	40.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>11.360.690.403</b>	<b>9.762.019.258,00</b>	<b>85,93</b>	<b>9.436.343.436,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>415.714.697</b>	<b>398.960.000,00</b>	<b>95,97</b>	<b>893.858.724,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415.714.697	398.960.000,00	95,97	893.858.724,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	0,00	9.660.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	0,00	0,00	9.660.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0	0,00	0,00	9.660.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	0,00	1.665.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0	0,00	0,00	1.665.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0	0,00	0,00	1.665.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	257.208.697	242.110.000,00	94,13	501.274.430,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	251.520.120	236.490.000,00	94,02	288.600.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	251.520.120	236.490.000,00	94,02	288.600.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.688.577	5.620.000,00	98,79	212.674.430,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.647.350	2.620.000,00	98,97	0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.041.227	3.000.000,00	98,64	5.342.430,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0,00	0,00	85.500.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	110.832.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0	0,00	0,00	11.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	31.080.000	31.000.000,00	99,74	186.910.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	31.080.000	31.000.000,00	99,74	153.910.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	31.080.000	31.000.000,00	99,74	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0	0,00	0,00	153.910.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0	0,00	0,00	33.000.000,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0	0,00	0,00	33.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% CAPAIAN 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0,00	0,00	2.999.700,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0	0,00	0,00	2.999.700,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0	0,00	0,00	2.999.700,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	127.426.000	125.850.000,00	98,76	191.349.594,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	75.598.000	75.400.000,00	99,74	98.080.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	35.638.000	35.600.000,00	99,89	33.180.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	39.960.000	39.800.000,00	99,60	64.900.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	51.828.000	50.450.000,00	97,34	93.269.594,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	51.828.000	50.450.000,00	97,34	93.269.594,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>415.714.697</b>	<b>398.960.000,00</b>	<b>95,97</b>	<b>893.858.724,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>11.776.405.100</b>	<b>10.160.979.258,00</b>	<b>86,28</b>	<b>10.330.202.160,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(11.776.405.100)</b>	<b>(10.160.979.258,00)</b>	<b>86,28</b>	<b>(10.330.202.160,00)</b>



## BAB IV

### PENUTUP

*Bab ini berisi simpulan umum terhadap pencapaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan BAPPEDA Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.*

Capaian target indikator pada tahun 2023 mencerminkan capaian Tahun akhir perencanaan (Resntra) BAPPEDA Kota Jambi periode 2018-2023. Hasil laporan kinerja BAPPEDA Kota Jambi tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja BAPPEDA Kota Jambi melampaui target yang ditentukan, yaitu:
  - a. Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan, telah melebihi target indikator sasaran yang ditetapkan yaitu capaian nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 101,63% (nilai 23,01 dari target 22,64) dan capaian nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 117,99%, (nilai 19,35 dari target 16,40). Dengan demikian akumulasi keberhasilan Sasaran Strategis 1 sebesar 109,81%, kategori **Sangat Tinggi**. Dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat peningkatan dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022, yaitu sebesar 100,74% untuk nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan untuk nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 100,76%.
  - b. Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan belum selesai penghitungannya karena masih dalam tahap pengumpulan data capaian sasaran RPJM pada OPD, namun berdasarkan tren realisasi tahun sebelumnya yang pencapaiannya diatas 100% (melebihi target) dengan peringkat **Sangat Tinggi**.
  - c. Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah ini setiap tahunnya telah sesuai target indikator sasaran yang ditetapkan yaitu 100%. Dengan demikian kategori untuk capaian kinerja Sasaran Strategis 3 ini juga **Sangat Tinggi**.
2. Anggaran dari total belanja program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp. 11.776.405.100,- terealisasi Rp.10.160.979.258,- atau

86,28%, dengan demikian Bappeda Kota Jambi telah melakukan efisiensi anggaran tahun 2023 sebesar 13,72% (Rp.1.615.425.842,-).

3. Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis tersebut, antara lain:
  - a. BAPPEDA Kota Jambi mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan target/indikator Sasaran Pemerintah Daerah sehingga rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya ditindaklanjuti bersama Inspektorat Kota Jambi dan Bagian Organisasi Setda Kota Jambi sebagai penanggungjawab capaian indikator Sasaran Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi dengan melaksanakan evaluasi internal atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah;
  - b. Secara berkesinambungan melakukan asistensi/pembinaan, baik terhadap penyusunan dokumen perencanaan tahunan dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*, maupun terhadap penyusunan dokumen anggaran Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian target sasaran RPJMD, target IKU Perangkat Daerah, target SPM, target SDGs maupun target IKK.
  
4. Langkah-langkah perbaikan ke depan untuk mengoptimalkan capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah, antara lain:
  - a) Penajaman Sasaran Strategis Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) dan dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data yang relevan untuk menggambarkan capaian kinerja;
  - b) Penajaman Cascading/penjenjangan kinerja level Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*, serta menggambarkan pola crosscutting kinerja antar bidang serta tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
  - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berorientasi capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan sebagai penentuan anggaran program dan kegiatan; dan

- d) Pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja sasaran dalam input perencanaan Perangkat Daerah.
- e) Melakukan inovasi terus menerus pada sistem perencanaan dan pengendalian yang telah ada di Bappeda untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk mencapai target kinerja sasaran perangkat daerah

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kota Jambi 2023 ini disusun sebagai gambaran capaian kinerja BAPPEDA Kota Jambi dan menjadi evaluasi internal untuk pelaksanaan program kegiatan dimasa mendatang agar kualitas perencanaan pembangunan daerah lebih baik.

Jambi, Januari 2024  
Kepala BAPPEDA Kota Jambi,



**SUHENDRI, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19700404 199601 1 002

## **LAMPIRAN 1: Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi**

### **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI**



#### **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHENDRI, SH., M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

Jabatan : Walikota Jambi

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

**Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.**

Jambi, Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

**SUHENDRI, SH., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700404 199601 1 002

## LAMPIRAN 2: Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA JAMBI  
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	22,64
		2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	16,40
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	3. Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	Persen	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	4. Persentase hasil kajian yang direkomendasi- kan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persen	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.539.534.235,-	APBDP
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.382.954.225,-	APBDP
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.161.751.910,-	APBDP
4	Penelitian dan Pengembangan Daerah	692.164.730,-	APBDP
TOTAL		<b>11.776.405.100,-</b>	APBDP

Jambi, Oktober 2023

PIHAK KEDUA



**Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.**

PIHAK PERTAMA



**SUHENDRI, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700404 199601 1 002

### LAMPIRAN 3: Inovasi BAPPEDA Kota Jambi

#### Daftar Inovasi BAPPEDA Kota Jambi

NO	URAIAN	TAHUN	DESKRIPSI
1	Bangkit Berdaya (Bangun Kelurahan secara Intensif Berazaskan Swadaya)	2014	merupakan program percepatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas lingkungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah. Pemkot dalam hal ini hanya memberi stimulus berupa bantuan bahan material/bangunan yang akan dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat. Sehingga menimbulkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat tidak hanya gotong royong masyarakat juga berlomba lomba untuk memberikan swadaya masyarakat baik berupa jasa, materil serta makanan untuk kegiatan bangkit berdaya yang ada di wilayahnya masingmasing.
2	e-Planning / SIRAMA (System Informasi Aspirasi Masyarakat)	2016	merupakan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem dalam jaringan melalui perencanaan pembangunan secara elektronik, yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kota Jambi.
3	e-Litbang	2021	merupakan aplikasi untuk penyimpanan dan media publikasikan hasil kajian yang ada di bidang Litbang Bappeda Kota Jambi
4	SIMPANG KERIS (Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Kepariwisata Terpadu Berbasis Geospasial)	2022	Merupakan portal informasi perencanaan pengembangan kepariwisataan Kota Jambi melalui process business model strategi pengembangan kepariwisataan Tematik, Holistik, Integrative dan Spasial (THIS) dengan memanfaatkan Sistim Informasi Geografis
5	e-BABE (elektronik pelaporan BAngkit BERdaya)	2022	merupakan aplikasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan Bangkit Berdaya menjadi lebih efektif dan efisien mulai dari perencanaan, penganggaran, verifikasi, dan monitoring hingga evaluasi kegiatan pembangunan melalui Bangkit Berdaya sehingga pemberkasannya terdokumentasi dengan baik.

6	SIPANDA (Sistem Pengelolaan Agenda)	2022	merupakan aplikasi secara online pengagendaan jadwal kegiatan berdasarkan surat/ undangan yang masuk dan disposisi Kepala Bappeda Kota Jambi untuk dihadiri oleh pejabat Bappeda Kota Jambi, dengan demikian dapat dilihat apa dan kapan acara/kegiatannya dan siapa yang di delegasikan utk menghadiri.
7	SiBANGMAN (Sistem Informasi Pembangunan Manusia)	2023	merupakan aplikasi untuk pemetaan dari 6 (enam) Program Pembangunan Nasional (meliputi Penghapusan Kemiskinan, Penurunan Stunting, Kota Sehat, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), AIDS-Tuberkulosis Malaria, dan Kota Layak Anak (KLA)) dalam bentuk tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (digital)
8	TREK (Digitalisasi Surat Pertanggungjawaban Kegiatan)	2023	merupakan aplikasi untuk memudahkan administrasi surat pertanggungjawaban kegiatan dengan cara digitalisasi, dan untuk mempermudah pengumpulan surat pertanggungjawaban dan meminimalisir segala resiko mengenai surat pertanggungjawaban, serta memudahkan dalam penelusuran arsipnya

## **LAMPIRAN 4: Penghargaan / Prestasi BAPPEDA Kota Jambi**

### **Tahun 2023**

1. Peringkat I Lomba Inovasi Daerah antar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi;
2. Peringkat II Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kota Jambi dengan Inovasi SiBangMan (System Informasi Pembangunan Manusia);
3. Peringkat III Pengawasan Arsip Internal 2023 dengan Nilai 88,36 (Sangat Baik); dan
4. Predikat Kota “Sangat Inovatif” dengan Skor Indeks 62.36 pada Penilaian *Inovative Government Award* (IGA) untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

### **Tahun 2022**

1. Peringkat I Lomba Inovasi Daerah antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
2. Peringkat III Pengawasan Arsip Internal 2022 dengan Nilai 79,19 (Sangat Baik);
3. Peringkat IV Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kota Jambi dengan Inovasi e-BABE (elektronik Pelaporan Bangkit Berdaya); dan
4. Predikat Kota “Sangat Inovatif” dengan Skor Indeks 62.22, dan “Terinovatif Peringkat 9” pada Penilaian *Inovative Government Award* (IGA) untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022 yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

### **Tahun 2021**

1. Peringkat III Pengawasan Arsip Internal 2021 dengan Nilai 65,89 (Baik); dan
2. Predikat Kota “Inovatif” dengan Skor Indeks 58,98 pada Penilaian *Inovative Government Award* (IGA) untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



**LAMPIRAN 5. Hasil Rekomendasi Kajian Tahun 2023**

NO	KAJIAN	TENAGA AHLI	REKOMENDASI	URUSAN	DITINDAK-LANJUTI PADA
1.	<b>Kajian Identifikasi Daerah Rawan Bencana di Kota Jambi</b>	1. Heeppy Haryadi Harahap, ST., M.Eng (Tenaga Ahli Utama/ Perencanaan Wilayah dan Kota) 2. Ngatmat, ST (Tenaga Ahli Utama/ Ahli Lingkungan)	1. Pembentukan Lembaga atau OPD terkait yang khusus membidangi kebencanaan hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa potensi bahaya bencana yang terjadi di Kota Jambi. Dengan adanya lembaga atau OPD maka strategi dan kebijakan dalam penanggulangan bencana serta pengurangan risiko bencana yang terjadi dapat dilakukan secara efektif dan optimal. 2. Menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) dalam upaya mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kota Jambi sesuai dengan amanat Perpres No. 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, salah satu sasaran pada tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menyusun kajian kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana dan menyusun kajian resiko dan tata ruang dikawasan rawan bencana dan pasca bencana. 3. Penerapan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung, hal ini perlu dilakukan guna menjamin keselamatan bagi penghuni gedung-gedung yang ada di Kota	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Rancangan RKPd Tahun 2025

NO	KAJIAN	TENAGA AHLI	REKOMENDASI	URUSAN	DITINDAK-LANJUTI PADA
			<p>Jambi, baik bangunan gedung pemerintah, fasilitas pelayanan publik, komersil dan bangunan gedung privat.</p> <p>4. Pentingnya membangun komitmen Pimpinan DPRD dalam mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang mengarusutamakan penanggulangan bencana, terutama dalam RPJMD Kota Jambi yang akan datang, menyusun dokumen pengurangan resiko bencana sesuai dengan komitmen dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goal's</i>).</p> <p>5. Perlunya dimasyarakatkan “pendidikan kebencanaan” diperkenalkan secara dini kepada anak sekolah agar sejak awal memahami pengurangan risiko bencana dan pengenalan bencana di lingkungan sekitarnya. Dalam upaya membangun kelembagaan agar dapat dibentuk “sekolah siaga bencana” di tingkat pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama). Demikian pula meningkatkan kapasitas tanggap bencana bagi masyarakat di tingkat kelurahan dan peningkatan peran masyarakat, sarana dan prasarana pendukung dalam mitigasi bencana serta penanganan bencana yang</p>		

NO	KAJIAN	TENAGA AHLI	REKOMENDASI	URUSAN	DITINDAK-LANJUTI PADA
			<p>secara berkala terjadi (misalnya : gelombang ekstrem, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan).</p> <p>6. Dalam peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana di Kota Jambi perlu dibentuk kelurahan siaga bencana yang dapat menjadi pelopor bagi pengembangan peran serta masyarakat dalam rangka desa siaga bencana. Langkah kebijakan tersebut dapat dirintis membentuk “Kelurahan Tangguh Bencana” dengan meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat. Kelurahan Tangguh bencana dapat dibentuk dengan percontohan satu kelurahan di masing-masing kecamatan atau diutamakan kecamatan yang memiliki tingkat risiki bahaya yang tinggi untuk masing-masing potensi bencana yang terjadi.</p> <p>7. Perlunya perangkat daerah dalam melaksanakan pelatihan atau peningkatan kapasitas kebencanaan dan pembentukan kelembagaan tangguh bencana di kelurahan dapat menjalin kerjasama dengan kalangan dunia usaha melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan perguruan tinggi melalui Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang</p>		

NO	KAJIAN	TENAGA AHLI	REKOMENDASI	URUSAN	DITINDAK-LANJUTI PADA
			<p>melibatkan mahasiswa dan dosen pada perguruan tinggi yang terdapat di Kota Jambi.</p> <p>8. Dibutuhkan peralatan proteksi kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran yang dapat menjangkau terjadinya bencana kebakaran pada gedung-gedung tinggi yang berada di Kota Jambi, karena saat ini sudah mulai tumbuh gedung-gedung tinggi yang memiliki risiko bencana kebakaran sementara armada pemadam kebakaran yang tersedia di Kota Jambi belum memungkinkan untuk melakukan penanganan kebakaran pada gedung-gedung tinggi tersebut.</p>		
2.	<p><b>Kajian Identifikasi Kondisi Kesehatan Penduduk di Kota Jambi</b></p>	<p>1. Erna Elfrida Simanjuntak, SKM., M.Kes (Tenaga Ahli Utama/Ahli Kesehatan Masyarakat)</p> <p>2. Listautin, M.Kes (Tenaga Ahli Utama/Ahli Kesehatan Lingkungan)</p>	<p>1. Perlu dipertimbangkan untuk secara rutin mengevaluasi program vaksinasi guna memastikan bahwa cakupan imunisasi di masyarakat sejalan dengan jumlah penduduk yang ditargetkan. Hal ini penting agar dapat menjamin bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan yang optimal terhadap penyakit yang dapat dicegah melalui vaksin. Evaluasi yang teratur dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi kesenjangan dalam cakupan vaksinasi, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas program tersebut. Dengan</p>	<p>Urusan Kesehatan</p>	<p>Rancangan RKPD Tahun 2025</p>

NO	KAJIAN	TENAGA AHLI	REKOMENDASI	URUSAN	DITINDAK-LANJUTI PADA
			<p>demikian, perlindungan kolektif terhadap penyakit menular dapat ditingkatkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sebagai tindakan pencegahan, melakukan kolaborasi antara pelayanan kesehatan (puskesmas) dengan lembaga pendidikan kesehatan lainnya. Dalam memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan (penyuluhan), yang mencakup informasi terkait penyakit menular dan tidak menular.</li> <li>3. Memperkuat kolaborasi antara OPD pemberi layanan kesehatan atau dinas terkait dengan dinas lingkungan hidup (DLH) dalam implementasi pendidikan kesehatan. untuk mengedukasikan masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.</li> <li>4. Untuk mencapai target skrining yang sangat besar, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerja Sama dengan pihak terkait dengan menggandeng lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan Membangun kemitraan dengan pihak swasta yang memiliki kepentingan dalam kesehatan masyarakat.</li> <li>b. Inovasi Teknologi yaitu menggunakan teknologi untuk memfasilitasi skrining yang lebih efisien, seperti penyediaan layanan</li> </ol> </li> </ol>		

NO	KAJIAN	TENAGA AHLI	REKOMENDASI	URUSAN	DITINDAK-LANJUTI PADA
			<p>skrining online atau melalui aplikasi dan memanfaatkan teknologi ponsel pintar untuk pengingat skrining dan penyampaian informasi</p> <p>c. Penyelenggaraan Acara Skrining Massal di lokasi strategis seperti pasar, pusat perbelanjaan, atau tempat-tempat umum lainnya.</p> <p>d. Program Insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam skrining, seperti diskon layanan kesehatan atau pemberian hadiah.</p> <p>e. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan secara berkala terhadap progres pencapaian target.</p>		
3.	<b>Kajian Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal pada Bank 9 Jambi</b>	<p>1. Dr. Rita Friyani, SE, M.Si (Tenaga Ahli Utama/Perencanaan Penyertaan Modal)</p> <p>2. Wiralestari, SE, M.Si (Tenaga Ahli Utama/Analisis Investasi)</p>	Berdasarkan hasil Kajian dan Analisa dari data yang telah didapatkan dan mengingat kebutuhan pemenuhan Modal Inti Bank Jambi terkait Peraturan OJK maka Tim Kajian merekomendasikan pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kota Jambi pada Bank Pembangunan Daerah Jambi <b>LAYAK</b> untuk dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	Urusan Penanaman Modal	Rancangan RKPd Tahun 2025
4.	<b>Kajian Potensi dan Tantangan Pengembangan Pertanian</b>	1. Yeni Selfia, S.Si, M.Si (Tenaga Ahli Utama/Perencanaan Wilayah dan Kota)	<p>1. Dibutuhkan Rencana Induk atau Masterplan Pertanian Perkotaan untuk Kota Jambi dengan konsep Pertanian Perkotaan.</p> <p>2. Dibutuhkannya regulasi yang mengatur pertanian perkotaan seperti Peraturan</p>	Urusan Pertanian	Rancangan RKPd Tahun 2025

NO	KAJIAN	TENAGA AHLI	REKOMENDASI	URUSAN	DITINDAK-LANJUTI PADA
	<b>dan Kualitas Hidup Penduduk Kota di Kota Jambi</b>	2. Fenie Tri Diana, SP (Tenaga Ahli Utama/Ahli Pertanian)	<p>Walikota Jambi terkait “<b>Gerakan Pertanian Perkotaan</b>”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengaturan tata niaga jenis dan produksi komoditi pertanian perkotaan.</li> <li>4. Fasilitasi pemasaran hasil komoditi pertanian perkotaan baik di dalam wilayah Kota Jambi maupun diluar Kota Jambi.</li> <li>5. Pembinaan kepada petani perkotaan terkait mekanisme pasar yang sehat dan terjamin.</li> <li>6. Menjadikan program pertanian perkotaan sebagai muatan lokal salah satu mata Pelajaran di sekolah terutama sekolah menengah atas atau kejuruan.</li> <li>7. Mempromosikan pertanian perkotaan pada tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat.</li> </ol>		